



RENCANA KERJA Tahun 2020

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MADIUN**



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Raya Solo No. 78, Jiwan Telp./Fax (0351) 464381

Email : bkkbn_kabmadiun@yahoo.com

MADIUN : 63161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 188.4/ 865A /402.207/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja merupakan pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional ;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun yang lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahun 2020 ;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2020 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun yang diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 56 Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MADIUN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2020

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun Tahun 2020 dengan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data-data yang dibutuhkan dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2020 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun ;
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 ;
- KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberhentikan setelah Laporan Kinerja selesai disusun dan telah diterima oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal Desember 2019

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MADIUN

Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690709 198809 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun

Nomor : 188.4/865A/402.207/2019

Tanggal : Desember 2019

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	Dra. Siti Zubaidah	Kepala Dinas PP dan KB PP dan PA	Pembina	
2.	Dr. Saifudin	Sekretaris Dinas PP dan KB PP dan PA	Ketua Tim	
3.	Hamimatus Syifaiyah, S.Sos	Kasubag. Penyusunan Program dan Pelaporan	Sekretaris	
4.	Anis Setyowati Rahayu, S.Si, M.Kes	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5.	Lilik Sri Sunarsih, SE	Kasubag Keuangan	Anggota	
6.	Drs. Ampuh Trikoranto	Kasi Advokasi, KIE dan Penggerakan	Anggota	
7.	Moch. Hasan, S.Si.	Kasi Pelayanan KB	Anggota	
8.	Nurul Hidajati, SH., M.Si.	Kasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB	Anggota	
9.	Suwandi, S.Sos	Kasi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja	Anggota	
10.	Endang Sri Wahyuni, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Keluarga	Anggota	
11.	Sutris Purnomo, SE	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Anggota	
12.	Tri Wahyuningsih, A.Md	Staf Subag. Penyusunan Program dan Pelaporan	Anggota	

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MADIUN

Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19690709 198809 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategi (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018–2023. Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga menggambarkan target sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada perubahan APBD tahun 2020 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi kepala daerah. Selain itu Rencana Kerja ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan maupun jumlah anggaran.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 ini diharapkan target dan komitmen kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun pada tahun 2020 dapat tercapai lebih efektif dan terukur.

Madiun, Desember 2019

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MADIUN

Dra. SITI ZUBAIDAH, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690709 198809 2 001

DAFTAR ISI

- Kata Pengantar
- Daftar Isi

BAB I	: PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	: EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III	: TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
	3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	36
BAB IV	: PENUTUP	44

- Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Renja disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu, tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan RKPD oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Renja OPD Tahun 2020 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019. Dokumen RENJA Tahun 2020 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Madiun Tahun 2020.

Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS dan RAPBD. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun bersangkutan dan tahun selanjutnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 1 tahun 2019 ;
- 9) Peraturan Bupati Madiun No. 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diubah dengan Peraturan Bupati Madiun No. 56 tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan perubahan tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Madiun.
- 3) Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PPKB & PPPA tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renstra K/L dan Propinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi.

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sub-bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Sub-bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tahun 2019. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
(apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun pada tahun 2018 telah melaksanakan 7 (tujuh) program dan 36 kegiatan. Masing-masing program tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 614.110.200,00; dengan realisasi anggaran APBD sebesar Rp. 580.030.326,00 atau 94,45%

Indikator programnya adalah : Prosentase pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output kegiatan : Jasa pengiriman paket pos dan surat menyurat terbayar selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 850.000,- dari jumlah anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 183.000,- (21,53 %)

Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 21,53% dikarenakan saat ini hanya sedikit surat menyurat yang harus dikirim melalui jasa pos maupun ekspedisi, sebagian besar surat menyurat dilaksanakan dengan menggunakan IT. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kinerja kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output kegiatan : Jasa telepon, listrik dll yang terbayar selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 75.333.000,- dari jumlah anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 63.515.512,- (84,31 %)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output kegiatan : Jumlah tenaga Kebersihan Kantor dan alat kebersihan kantor yang tersedia selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 39.600.000,- dari anggaran APBD terealisasi sejumlah Rp. 39.594.000,- (99,98%)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output kegiatan : Jumlah ATK yang diadakan selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 50.000.000,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 49.547.500,- (99,10%).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

e. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Output kegiatan : Jumlah barang cetak amplop, stop map dan foto copy yang diadakan selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 19.445.200,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 19.323.500,- (99,37%).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

f. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Output kegiatan : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 2.910.000,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 2.550.000,- (87,63%)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

g. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Output kegiatan : Jumlah Snack, makan dan minum rapat harian yang diadakan selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 32.000.000,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 30.850.000,- (96,41%).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Output kegiatan : Jumlah perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 320.850.000,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 320.809.000,- (99,99%).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

i. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Output kegiatan : Jumlah perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 35.000.000,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 17.657.500,- (50,45%).

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

j. Kegiatan Penyedia Jasa Keamanan

Output kegiatan : Kantor yang aman selama 12 bulan

Realisasi anggaran : Rp. 24.000.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 24.000.000,- (100,00%)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100,00%.

k. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Kinerja SKPD

Output kegiatan : Jumlah tenaga non PNS/PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu) yang siap pakai selama 12 bulan.

Realisasi anggaran : Rp. 14.122.000,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- (84,97%)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 274.600.000,00; proporsi realisasi dari anggaran sebesar Rp. 237.878.385,00 atau 86,63%

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Output kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik.

Realisasi anggaran : Rp. 30.600.000,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 30.477.000,- (99,60%)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Output kegiatan : Suku cadang, BBM, Pelumas, pajak kendaraan dan servis kendaraan dinas/operasional tersedia selama 12 bulan.

Proporsi realisasi : Rp. 202.000.000,- dari anggaran terealisasi sebesar Rp. 165.402.865,- (81,88%)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

Output kegiatan : Jumlah mebeleur yang terpelihara dengan baik selama 12 bulan.

Proporsi realisasi : Rp. 5.000.000 dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- (100,00%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100%.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer/Printer/AC dan Mesin Tik)

Output kegiatan : Peralatan kantor yang terpelihara selama 12 bulan.

Proporsi realisasi : Rp. 37.000.000,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 36.998.520,- (100,00%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 16.000.000,00; proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 15.303.000,00 atau 95,64%.

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Output kegiatan : Jumlah karyawan yang mengikuti bimtek imlementasi peraturan perundangan.

Proporsi realisasi : Rp. 16.000.000,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 15.303.000,- (95,64%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 23.550.000,00; proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 22.660.500,00 atau 96,22%.

a. *Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD*

Output kegiatan : Dokumen laporan kinerja dan keuangan selama 12 bulan.

Proporsi realisasi : Rp. 23.550.000,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 22.660.500,- (96,22%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100%. Tahun 2018 telah disusun 18 dokumen perencanaan dan pelaporan dengan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Madiun 68,57 (B)

5. **Program Keluarga Berencana** dengan anggaran sebesar Rp. 7.724.611.700,00; dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 5.127.102.483,00 atau 66,37%.

a. *Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana*

Output kegiatan : Peserta KB aktif yang menggunakan MKJP.

Proporsi realisasi : Rp. 148.850.000,- dari anggaran APBD terealisasi sebesar Rp. 148.549.950,- (99,80%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 99,41%. Artinya dari target peserta KB MKJP sejumlah 34.767 orang, yang benar-benar menjadi peserta KB MKJP sejumlah 34.563 orang.

b. *Kegiatan Rakerda Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan PPPA).*

Output kegiatan : Info program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB dan PK) dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersampaikan pada mitra kerja dan instansi terkait.

Realisasi anggaran : Rp. 42.876.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 42.876.000,- (100,00%)

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan mitra kerja yaitu ormas, TNI AD, Polri dan instansi terkait.

c. *Kegiatan Pelayanan KB.*

Output kegiatan : Jumlah peserta KB yang terlayani.

Realisasi anggaran : Rp. 309.904.400,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 310.375.000,- (99,85%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100%. Dari 108.008 orang target calon akseptor, yang benar-benar menjadi akseptor KB aktif sejumlah 106.409 orang (98,52%). Untuk peserta KB baru, dari target sejumlah 23.120 orang yang menjadi peserta KB baru sejumlah 18.739 orang (81,05%).

d. Kegiatan Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Output kegiatan : Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mandiri.

Realisasi anggaran : Rp. 1.032.522.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.036.160.000,- (99,65%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100%.

Dari IMP sejumlah 1.286 orang yang terdiri dari 206 orang PPKBD dan 1.80 orang sub PPKBD, yang bisa menjadi IMP mandiri dan mumpuni hanya sejumlah 386 orang (32,02%), tetapi 1.286 orang IMP itu semuanya mendapatkan bantuan operasional setiap bulan selama 11 bulan dengan rincaian Rp. 75.000,-/org/bulan dan Rp. 50.000,-/org/bln.

e. Kegiatan Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Output kegiatan : Jumlah KIE program KB melalui media elektronik dan non elektronik.

Realisasi anggaran : Rp. 305.013.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 308.266.800,- (98,94%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100%.

Kegiatan ini digunakan untuk publikasi program dan kegiatan baik melalui media elektronik (televisi) maupun non elektronik (media massa, baliho, benner, leaflet, dll) serta melaksanakan kegiatan yang bersifat advokasi dengan mitra kerja (instansi terkait, lembaga/ormas)

f. Kegiatan Pembinaan Kelompok Tri Bina.

Output kegiatan : Kelompok Tri Bina (BKB, BKR dan BKL) yang aktif.

Realisasi anggaran : Rp. 112.850.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 113.850.000,- (99,12%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengaktifkan dan mengembangkan kelompok tri bina (BKB, BKR dan BKL) yang ada dengan cara pembinaan maupun evaluasi dan mengKIE supaya anggota tri bina mau dan aktif menjadi peserta KB. Tahun 2018 dari 24.334 orang anggota BKB yang PUS, 19.230 orang menjadi peserta KB aktif (79,03%), untuk anggota BKR yang menjadi peserta KB sejumlah 6.625 orang dari 8.235 orang yang PUS (80,45%) sedangkan anggota BKL yang menjadi peserta KB sejumlah 3.180 orang dari anggota yang PUS sejumlah 5.484 orang (57,99%).

g. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga.

Output kegiatan : Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB.

Realisasi anggaran : Rp. 258.030.000,- dari anggaran APBD sebesar
Rp. 261.150.000,- (98,81%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 83,94%. Pada tahun 2018 anggota UPPKS yang Pus sejumlah 1.606 orang dan yang menjadi peserta KB sejumlah 1.348 orang (83,94%).

h. Kegiatan Pendataan Keluarga

Output kegiatan : Rekap data mikro keluarga tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Madiun.

Realisasi anggaran : Rp. 153.960.000,- dari anggaran APBD sebesar
Rp. 200.710.000,- (76,71%).

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan pendataan dan updating data keluarga guna memperoleh data mikro keluarga di seluruh desa/kelurahan se Kabupaten Madiun.

i. Kegiatan Biaya Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di Kecamatan (BOKB)-DAK Non Fisik.

Output kegiatan : Biaya operasional pendukung program KB di Balai KB.

Realisasi anggaran : Rp. 2.075.886.058,- dari anggaran APBD sebesar
Rp. 4.543.712.900,- (46,69%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Biaya operasional KB ini digunakan untuk membiayai biaya operasional KB baik di kantor maupun pada balai KB di 15 kecamatan.

j. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (DAK Fisik)

Output kegiatan : Biaya operasional untuk pengadaan sarana prasarana pendukung program KB.

Realisasi anggaran : Rp. 470.689.800,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 518.537.000,- (90,77%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Tahun 2018, telah dibelikan smartphone sejumlah 36 buah untuk diserahkan pada PKB/PLKB dan genre kit 10 set yang dihibahkan pada SLTP dan SLTA se Kabupaten Madiun.

k. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penunjang DAK Fisik).

Output kegiatan : Sarana prasarana pendukung program KB.

Realisasi anggaran : Rp. 18.847.375,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 19.250.000,- (97,91%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Kegiatan ini digunakan untuk menunjang terlaksananya pengadaan barang dan jasa pada kegiatan DAK fisik

l. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk.

Output kegiatan : Sarana prasarana pendukung program KB.

Realisasi anggaran : Rp. 0,- dari anggaran bersumber APBD sebesar Rp. 22.000.000,- (0,00%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 0,00% dikarenakan belum tersusunnya dokumen parameter kependudukan.

m. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun.

Output kegiatan : Pencanaan kampung KB

Realisasi anggaran : Rp. 197.972.900,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 198.874.000,- (99,55%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%

Untuk tahun 2018 telah dicanangkan 15 kampung KB dari 15 kecamatan sekabupaten Madiun.

6. **Program Kesehatan Reproduksi Remaja** dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00; proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 125.050.000,00 atau 83,37%.

a. *Kegiatan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).*

Output kegiatan : Jumlah PUS yang usia istrinya dibawah 20 tahun dan jumlah penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja.

Realisasi anggaran : Rp. 125.050.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 150.000.000,- (83,37%)

Proporsi capaian indikator kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%, artinya semua kegiatan telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan PUS yang usia istrinya dibawah 20 tahun pada tahun 2018 sebesar 6,47% dari jumlah perkawinan semua usia.

7. **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan** dengan anggaran sebesar Rp. 309.760.000,00; proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 302.724.825,00 atau 97,73%.

a. *Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan*

Output kegiatan : Jumlah kelompok kegiatan yang berkembang dan aktif.

Realisasi anggaran : Rp. 180.800.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 182.130.000,- (99,27%).

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Kegiatan ini digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guna meningkatkan kualitas hidup perempuan seperti pembinaan pada keluarga BKTl dan peringatan hari besar yang berkaitan dengan perempuan (hari kartini dan hari ibu)

b. *Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.*

Output kegiatan : Pencatatan, pendampingan penanganan kasus kekerasan dan penjangkauan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Realisasi anggaran : Rp. 121.924.825,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 127.630.000,- (95,53%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Kegiatan pencatatan, pendampingan penanganan kasus kekerasan dan penjangkauan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ini dilaksanakan selama 12 bulan.

8. **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak** dengan anggaran sebesar Rp. 421.930.000,00; proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 344.304.600,00 atau 81,60%.

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender

Output kegiatan : Fasilitasi pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya/APE berupa pertemuan dan penguatan pokja PUG.

Realisasi anggaran : Rp. 98.654.850,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 99.240.000,- (99,41%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%. Tahun 2018 Kabupaten Madiun telah meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya/APE kategori "**madya**".

b. Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kabupaten Layak Anak.

Output kegiatan : Fasilitasi Forum Anak dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak serta fasilitasi pencapaian Kab. Layak Anak

Realisasi anggaran : Rp. 245.649.750,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 322.690.000,- (76,13%)

Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%.

Tahun 2018 Kabupaten Madiun telah meraih Kabupaten Layak Anak dengan kategori "**madya**".

Hasil Analisis pencapaian kinerja 8 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&KB, PP&PA) Kabupaten Madiun pada Tahun 2018 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi. Sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar 70,85%.

Sedangkan untuk capaian kinerja hasil pelaksanaan Renja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2018

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Realisasi 2017	Target dan Realisasi 2018			Target 2019	Perkiraan Realisasi dan Capaian Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian
2.02... . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman paket pos dan surat menyurat terbayar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Listrik, telepon dan air siap pakai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor yang bersih	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum harian dan rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.01.23	Penyediaan Jasa Keamanan	Jasa keamanan terbayar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.01.24	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Tenaga kerja non PNS siap pakai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02... . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Realisasi 2017	Target dan Realisasi 2018			Target 2019	Perkiraan Realisasi dan Capaian Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian
2.02.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Meubeleur kantor terpelihara	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (Komputer, Printer, AC dan Mesin Tik)	Sarana pendukung kantor siap pakai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.02.... .06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Prosentase pengelolaan dokumen pelaporan/ evaluasi pelaksanaan kegiatan/ pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.02.06.05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasasi kinerja SKPD yang tersusun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2.08... .15	Program Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif	76,35%	75,00%	77,19%	102,92%	76,85%	76,85%	100,00%
		Rata-rata Jumlah Anak Yang Dilahirkan Wanita Selama Masa Reproduksi (Total Fertility Rate / TFR)	2,02	2,05	2,19	93,61	2,19	2,19	100,00%
2.08.15.05	Pembinaan KB	Jumlah kelompok KB MKJP yang terbentuk	16 kelp	31 kelp	31 kelp	100,00%	46 kelp	46 kelp	100,00%
2.08.15.08	Pelayanan KB	Jumlah peserta KB Baru	23.275 org	23.120	18.739 org	81,05%	17.700 org	17.700 org	100,00%
2.08.15.09	Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah pembinaan dan evaluasi kader IMP	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00%	-	-	-
2.08.15.10	Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah publikasi program melalui media elektronik dan non elektronik	3 paket	3 paket	3 paket	100,00%	3 paket	3 paket	100,00%
2.08.15.11	Pembinaan Kelompok Tribina	Kelompok Tri Bina (BKB, BKR dan BKL) yang aktif	1.431 kelp	1.431 kelp	1.440 kelp	100,63%	-	-	-

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Realisasi 2017	Target dan Realisasi 2018			Target 2019	Perkiraan Realisasi dan Capaian Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian
2.08.15.12	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	196 kelp	196 kelp	198 kelp	101,02%	198 kelp	198 kelp	100,00%
2.08.15.15	Pendataan Keluarga	Data basis keluarga setiap desa/ kelurahan	1 dok	1 dok	1 dok	100,00%	-	-	-
2.08.15.16	Biaya Operasional KB (BOKB) (DAK Non Fisik)	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	14 balai KB	15 balai KB	15 balai KB	100,00%	15 balai	15 balai	100,00%
2.08.15.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Kependudukan dan KB (DAK Fisik)	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program kependudukan dan KB	3 paket	4 paket	4 paket	100,00%	5 paket	5 paket	100,00%
2.08.15.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Kependudukan dan KB (Penunjang DAK Fisik)	Penunjang pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program kependudukan dan KB	3 paket	4 paket	4 paket	100,00%	-	-	-
2.08.15.22	Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	3 dokumen	3 dokumen	100,00%
2.08.15.23	Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun	Jumlah kampung KB yang mandiri	16 desa	31 desa	31 desa	100,00%	31 desa	31 desa	100,00%
2.08... . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Perkawinan Yang Usia Istrinya Dibawah 20 Tahun	7,51	9,29	6,47	143,59%			
2.08.16.01	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi pada Remaja dan Kader KB	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00%	-	-	-
2.02... . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
2.02.17.11	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00%	-	-	-

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Realisasi 2017	Target dan Realisasi 2018			Target 2019	Perkiraan Realisasi dan Capaian Tahun 2019	
				Target	Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian
2.02.17.12	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah advokasi dan fasilitasi pencegahan, penanganan dan pendampingan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00%	-	-	-
2.02... . 19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Perempuan Yang Mempunyai Penghasilan	51,65	51,65	51,95	100,58%	-	-	-
2.02.19.02	Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	Jumlah pembinaan program pemberdayaan perempuan	15 kali	15 kali	15 kali	100,00%	-	-	-
2.02.19.03	Sosialisasi dan Advokasi Kabupaten Madiun Layak Anak	Jumlah fasilitasi dan advokasi KLA	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	-	-	-

1.6. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14, ayat (1), huruf p. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dari 3 (tiga) urusan sesuai dengan pasal 15, ayat 3, 4 dan 5 Dinas PP dan KB, PP dan PA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 2 (dua) urusan pemerintahan wajib non dasar yang harus dilaksanakan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PP dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD dengan mitra kerja, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun melaksanakan program kerja 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* yang diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan misi yang diemban, sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas PP&KB, PP&PA dengan program pemerintah Kabupaten Madiun menjadi mutlak.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas pelaksanaan program kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan. Beberapa hal yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas tersebut meliputi :

1. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap program dan kegiatan dengan disosialisasikannya melalui kegiatan advokasi.
3. Meningkatnya keikutsertaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam pelaksanaan semua program kependudukan, KB dengan meningkatnya jumlah peserta KB modern dan tersedianya dokumen data mikro keluarga tingkat desa sebagai hasil dari pendataan keluarga.
4. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan serta monitoring pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.

Berikut ini tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama :

Tabel 2.2

Pencapaian Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2013 s.d 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SPM	IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian						Keterangan
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
Tujuan : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)																
1.	Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB aktif	Ada	Ada	75,63	76,50	76,75	77,00	75,00	75,00	75,63	75,03	74,05	75,54	76,35	77,19	
2.	Persentase perkawinan dengan usia istrinya dibawah 20 tahun	Ada	-	12,48	9,91	9,83	9,71	9,29	9,29	12,48	9,91	10,83	9,71	7,51	6,47	
3.	Rata-rata Jumlah Anak Yang Dilahirkan Wanita Selama Masa Reproduksi (Total Fertility Rate / TFR)	-	-	2,22	2,18	2,15	2,12	2,09	2,05	2,22	2,22	2,22	2,02	2,02	2,19	
Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak																
Tujuan : Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak Indikator Tujuan : Indek Pembangunan Gender (IPG)																
4.	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	Ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.	Persentase Perempuan Yang Mempunyai Penghasilan		Ada	50,65	50,65	50,63	51,53	51,65	51,65	50,65	50,65	50,63	51,53	51,65	51,95	

1.7. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Ada beberapa cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijakan, rangkaian program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun.

Kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun dirumuskan melalui Renstra PD tahun 2018-2023 yang tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Madiun.

Ada beberapa tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan program pada Dinas PP dan KB, PP dan PA tahun 2018 yang harus segera diatasi dengan rencana aksi Dinas PP dan KB, PP dan PA tahun 2020 antara lain :

1. Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, maka tahun 2020 dilaksanakan *program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan* melalui kegiatan :
 - Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
 - Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender.
2. Belum mempunyai sarana prasarana pendukung (shelter/gedung dan kendaraan) khusus untuk melayani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk mengatasi masalah ini, maka perlu dibentuk pojok konsultasi di tingkat desa dan tingkat kecamatan yang bertempat di kantor kecamatan/balai penyuluh KB serta dibentuk P2TP2A ditingkat kabupaten yang bertempat di Dinas PPKB dan PPPA. Untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak ini, maka dilaksanakan dengan *program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak* melalui kegiatan :
 - Penyediaan Data Gender dan Anak
 - Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
 - Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak

3. Adanya anggapan masyarakat bahwa alkon non MKJP lebih praktis, untuk merubah anggapan ini maka harus didukung adanya KIE yang lebih mantap melalui Kontap (kontrasepsi mantap) dari petugas KB dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan pelayanan KBKR. Untuk melaksanakan kontap pada tahun 2020 akan didukung dengan *program Keluarga Berencana* melalui kegiatan :
 - Pembinaan Keluarga Berencana
 - Pelayanan Keluarga Berencana
 - Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
 - Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).
4. Permasalahan kependudukan dalam konteks Keluarga Berencana seharusnya menjadi permasalahan prioritas untuk menjadikan perencanaan pembangunan berbasis kependudukan. Untuk mengatasi masalah ini, maka harus dilaksanakan advokasi yang lebih mantap pada para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan yang didukung dengan data mikro kependudukan melalui *program Pengendalian Penduduk* yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Pelayanan Advokasi dan KIE
 - Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk.
 - Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun
5. Untuk mempersiapkan anak menghadapi perkembangan teknologi yang berakibat timbulnya kasus anak-anak yang semakin mengawatirkan, seperti kenakalan remaja, kekerasan seksual remaja, akses pornografi, perbuatan amoral remaja, serta penggunaan narkoba maka perlu adanya pendampingan dari orangtua. Untuk inilah diperlukan ketahanan keluarga yaitu “kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996).” Untuk mengatasi masalah ketahanan keluarga dan remaja ini didukung oleh *program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja* yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Pemberdayaan Keluarga
 - Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja

Adapun strategi dan kebijakan Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan akses dan pelayanan KB** dengan kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek
 - b. Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan
 - c. Penguatan kelembagaan serta data dan informasi kependudukan dan KB
 - d. Penguatan jejaring dalam upaya peningkatan pelayanan Keluarga Berencana
 - e. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KB
2. **Penguatan kapasitas kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)** melalui kebijakan :
 - a. Penguatan regulasi, strategi advokasi - KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi
 - b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan
 - c. Peningkatan kapasitas Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja
3. **Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga** dengan kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga
 - b. Penguatan kebijakan usia perkawinan
 - c. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga
 - d. Meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi
 - e. Penguatan dan pengembangan kerjasama dengan mitra kerja
4. **Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan** dengan kebijakan sebagai berikut :
 - a. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender (PPRG) kepada OPD atau lembaga pemerintah
 - b. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender
 - c. Pemberdayaan ekonomi perempuan
 - d. Penguatan lembaga jejaring Pengarus Utamaan Gender (PUG)
 - e. Pembentukan regulasi perpektif gender
5. **Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak** dengan kebijakan sebagai berikut :
 - a. Penguatan regulasi peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
 - b. Meningkatkan kualitas layanan perlindungan khusus anak dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

- c. Penguatan jejaring pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
- d. Percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam perkembangan kedepan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Dinas PP&KB, PP&PA diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menyelesaikan semua tantangan dan permasalahan. Untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan sosial partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan dan institusi masyarakat ditingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

1.8. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2020, memuat program dan kegiatan seluruh PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing PD masih dimungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing PD, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif (yang ditetapkan Bupati).

Demikian halnya program dan kegiatan pada Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun, program dan kegiatan prioritas tahun 2020 yang telah masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2020 tetapi belum sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga perlu disempurnakan melalui usulan pada Renstra PD dan RPJMD tahun 2018-2023. Selanjutnya program dan kegiatan Dinas PP&KB, PP&PA yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Madiun ini dijadikan dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020.

Prioritas Program pada Dinas PP&KB, PP&PA lebih disempurnakan lagi karena sangat mendukung capaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 khususnya prioritas pembangunan kesehatan. Capaian kinerja yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program pembangunan tahun 2020 pada Dinas PP&KB, PP&PA adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rancangan Awal RENJA Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2020	Program
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	1. Rata - rata anak yang dilahirkan wanita selama masa reproduksinya (total Fertility Rate/TFR)	2,19	1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pengendalian Penduduk
			2. Persentase keluarga sejahtera	83,35	3. Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
		2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	3. Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan politik	7,12	4. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
		3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	4. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100,00	5. Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak
					6. Program Pelayanan Kesekretariatan

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Dinas PP&KB, PP&PA merencanakan program yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5
Keterkaitan Program Dinas PP&KB, PP&PA
dengan RPJMD Kabupaten Madiun 2020

No.	Strategi RPJMD	Program Dinas PPKB, PPPA
1.	Peningkatan Akses dan pelayanan KB	1. Program Keluarga Berencana
2.	Penguatan kapasitas kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	2. Program Pengendalian Penduduk
3.	Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga	3. Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
4.	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	4. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
5.	Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	5. Program Peningkatan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak
		6. Program Pelayanan Kesekretariatan

Sedangkan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Madiun
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)	75,00	470.279.141	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan		586.019.083	
			Nilai SAKIP OPD	80,00							
2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKB, P3A	Alat Tulis Kantor	12 bulan	55.450.090	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKB, P3A	Alat Tulis Kantor		55.450.090	
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKB, P3A	Barang cetak dan penggandaan	12 bulan	19.173.290	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKB, P3A	Barang cetak dan penggandaan		19.173.290	
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPKB, P3A	Peralatan rumah tangga tersedia	12 bulan	12.715.505	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPPKB, P3A	Peralatan rumah tangga tersedia		12.715.505	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPPKB, P3A	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPPKB, P3A	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1.800.000	
6.	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKB, P3A	Makan dan minum harian dan rapat	12 bulan	39.314.520	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKB, P3A	Makan dan minum harian dan rapat		49.314.520	Anggaran bertambah Rp. 10.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
7.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKB, P3A	Perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	150.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKB, P3A	Perjalanan dinas luar daerah		250.000.000	Anggaran bertambah Rp. 100.000.000
8.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DPPKB, P3A	Perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DPPKB, P3A	Perjalanan dinas dalam daerah		12.000.000	
9.	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	DPPKB, P3A	Tenaga kerja non PNS siap pakai	12 bulan	110.734.200	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	DPPKB, P3A	Tenaga kerja non PNS siap pakai		110.734.200	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan	100,00 %	248.937.225	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan		230.197.283	
10.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	DPPKB, P3A	Gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	19.997.150	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	DPPKB, P3A	Gedung kantor yang terpelihara		19.997.150	
11.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKB, P3A	Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai	12 bulan	195.099.950	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKB, P3A	Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai		173.360.008	Anggaran bertambah Rp. 21.739.942
12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	DPPKB, P3A	Meubeleur kantor terpelihara	12 bulan	3.850.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	DPPKB, P3A	Meubeleur kantor terpelihara		3.850.000	
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (Komputer, Printer, AC dan Mesin Tik)	DPPKB, P3A	Sarana pendukung kantor siap pakai	12 bulan	29.990.125	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (Komputer, Printer, AC dan Mesin Tik)	DPPKB, P3A	Sarana pendukung kantor siap pakai		32.990.125	Anggaran bertambah Rp. 3.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
III.	Program Keluarga Berencana		Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif	76,90%	6.260.951.008	Program Keluarga Berencana		Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif	76,90%	6.270.951.008	
14.	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	DPPKB, P3A	Jumlah promosi hak reproduksi individu yang dilakukan	12 kali	22.202.400	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	DPPKB, P3A	Jumlah promosi hak reproduksi individu yang dilakukan	12 kali	22.202.400	
15.	Pembinaan KB	15 kecamatan	Jumlah kelompok KB MKJP yang terbentuk	61 kelp	139.859.325	Pembinaan KB	15 kecamatan	Jumlah kelompok KB MKJP yang terbentuk	61 kelp	139.859.325	
16.	Pelayanan KB	15 kecamatan	Jumlah peserta KB Baru	17.825 org	151.961.983	Pelayanan KB	15 kecamatan	Jumlah peserta KB Baru	17.825 org	174.766.983	
			Jumlah akseptor KB yang dilayani	88.638 org				Jumlah akseptor KB yang dilayani	88.638 org		
17.	Biaya Operasional KB (BOKB) (DAK Non Fisik)	15 kecamatan	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	15 balai KB	4.201.365.000	Biaya Operasional KB (BOKB) (DAK Non Fisik)	15 kecamatan	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	15 balai KB	4.201.365.000	
18.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Kependudukan dan KB (DAK Fisik)	15 kecamatan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program kependudukan dan KB	5 paket	1.666.317.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Kependudukan dan KB (DAK Fisik)	15 kecamatan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program kependudukan dan KB	5 paket	1.666.317.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
19.	Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan KKB dan Kespro (KBKR)	DPPKB, P3A	Jumlah tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi/ mendapat sertifikat CTU	20 org	79.245.300	Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan KKB dan Kespro (KBKR)	DPPKB, P3A	Jumlah tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi/ mendapat sertifikat CTU	20 org	66.440.300	
IV.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi	51,70%	208.662.775	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi	51,70%	208.662.775	
20.	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Kab. Madiun	Jumlah perempuan yang bekerja	132.500 org	75.093.950	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Kab. Madiun	Jumlah perempuan yang bekerja	132.500 org	75.093.950	
21.	Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	Kab. Madiun	Jumlah lembaga berbasis gender yang aktif	66 lembaga	83.568.825	Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	Kab. Madiun	Jumlah lembaga berbasis gender yang aktif	66 lembaga	83.568.825	
V.	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan Dan Anak		Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,040	258.139.550	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan Dan Anak		Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,040	403.139.550	
22.	Penyediaan Data Gender dan Anak	Kab. Madiun	Dokumen data gender dan anak	4 dokumen	46.115.000	Penyediaan Data Gender dan Anak	Kab. Madiun	Dokumen data gender dan anak	4 dokumen	46.115.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
23.	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kab. Madiun	Jumlah Forum Anak dan lembaga layanan anak yang terfasilitasi	2 lembaga	114.028.750	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kab. Madiun	Jumlah Forum Anak dan lembaga layanan anak yang terfasilitasi	2 lembaga	114.028.750	
VI.	Program Pengendalian Penduduk		Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	9,87	1.792.555.370	Program Pengendalian Penduduk		Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	9,87	2.263.555.370	
24.	Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	15 kecamatan	Jumlah kader IMP yang mandiri	643 org	1.694.936.090	Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	15 kecamatan	Jumlah kader IMP yang mandiri	643 org	1.939.436.090	
25.	Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	15 kecamatan	Jumlah publikasi program melalui media elektronik dan non elektronik	3 paket	64.779.330	Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	15 kecamatan	Jumlah publikasi program melalui media elektronik dan non elektronik	3 paket	64.779.330	
26.	Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk	15 kecamatan	Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan	2 dokumen	10.888.350	Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk	15 kecamatan	Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan	2 dokumen	237.388.350	
27.	Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun	15 kecamatan	Jumlah kampung KB yang mandiri	31 desa	21.951.600	Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun	15 kecamatan	Jumlah kampung KB yang mandiri	31 desa	21.951.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Keterangan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
VII.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja		Persentase perkawinan yang usia istrinya dibawah 20 tahun	7,25	286.510.295	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja		Persentase perkawinan yang usia istrinya dibawah 20 tahun	7,25	286.510.295	
29.	Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Kab. Madiun	Jumlah kelp. Tribina dan PIK-R yang aktif	1.440 kelp	68.342.200	Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja		Jumlah kelp. Tribina dan PIK-R yang aktif	1.440 kelp	68.342.200	
29.	Pemberdayaan Keluarga	15 kecamatan	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	200 kelp	218.168.095	Pemberdayaan Keluarga		Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	200 kelp	218.168.095	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang hanya diinginkan oleh perangkat daerah. Untuk itu kualitas dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB, PPPA) merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjangkaran aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja Bupati Madiun dalam proses kegiatan Musrenbang dan Bhakti Sosial terpadu (BST) dan selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan rencana kerja Dinas PPKB, PPPA didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah Kabupaten secara :

- a. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara
- b. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah

- c. Efisien yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
- d. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- h. berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum OPD ada beberapa usulan kegiatan yang ditujukan kepada Dinas PPKB, PPPA dari kelompok masyarakat. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat permohonan terhadap pelaksanaan kegiatan dan bantuan sarana prasarana yang direncanakan. Dari beberapa usulan masyarakat tidak semuanya dapat disetujui oleh OPD dengan alasan :

- a. Jika permohonan itu sumber dananya adalah DAK maka pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang keluarnya setelah pelaksanaan musrenbang.
- b. Jika bantuan yang diajukan ternyata tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA, maka akan dialihkan pada OPD yang menangani.

Secara terinci usulan program dan kegiatan untuk tahun 2020 dari pemangku kepentingan dan masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Usulan	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja, Pemberdayaan Keluarga	Ds. Sidorejo, Kebonsari	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	1 kelompok	Dilaksanakan sebagai kegiatan rutin dengan sasaran kelompok perwakilan tiap kecamatan
2.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja, Pemberdayaan Keluarga	Ds. Balerejo, Kebonsari	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	1 kegiatan	
3.	Program Keluarga Berencana, Pelayanan KB	Ds. Bacem, Kebonsari	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 paket	
4.	Program Keluarga Berencana, Pelayanan KB	Ds. Blimbing, Dolopo	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
5.	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak, Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak	Ds. Klorogan, Geger	Sosialisasi tentang Pojok Konsultasi tingkat Kecamatan dan Desa	1 paket	Hanya sebagai narasumber
6.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Sangen, Geger	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	50 orang	
7.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Sumberbening Balerejo	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 kegiatan	Menunggu juknis DAK th. 2020
8.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Bajulan, Saradan	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 kegiatan	Menunggu juknis DAK th. 2020
9.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Muneng Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 paket	menunggu juknis DAK th. 2020
10.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Muneng Pilangkenceng	Pelatihan Pendidik/Konselor Sebaya pada pengurus dan Anggota PIK Remaja	1 unit	
11.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Muneng Pilangkenceng	Sosialisasi program PIK Remaja	1 paket	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Usulan	Besaran/ Volume	Catatan
12.	Program Peningkatan Keluarga dan Remaja Kualitas Ketahanan Pemberdayaan Keluarga	Ds. Muneng Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	1 paket	
13.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Muneng Pilangkenceng	Pelatihan pada Kader dan kelompok UPPKS	1 paket	
14.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Muneng Pilangkenceng	Pelatihan Kader Tribina	1 paket	
15.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Pulerejo Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 paket	
16.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Kedungrejo Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
17.	Program Pengendalian Penduduk Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Ds. Kedungrejo Pilangkenceng	Pemutaran film tentang informasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBBPK)	0	
18.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kedungrejo Pilangkenceng	Pelatihan Kader Tribina	0	
19.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Wonoayu Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
20.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds/Kec. Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
21.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Sumbergandu Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
22.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Sumbergandu Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	0	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Usulan	Besaran/ Volume	Catatan
23.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Sumbergandu Pilangkenceng	Pelatihan pada Kader dan kelompok UPPKS	0	
24.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Kedungmaron Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
25.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kedungmaron Pilangkenceng	Sosialisasi program PIK Remaja	0	
26.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Duren Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok tribina kecamatan	0	
27.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
28.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok tribina kecamatan	1 kegiatan	
29.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	0	
30.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Pelatihan pada Kader dan kelompok UPPKS	0	
31.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Penyuluhan pemberdayaan perempuan bidang politik, ekonomi dan sosial budaya	0	
32.	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Sosialisasi tentang Pojok Konsultasi tingkat Kecamatan dan Desa	0	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Usulan	Besaran/ Volume	Catatan
33.	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Ds. Kenongorejo Pilangkenceng	Sosialisasi tentang Kabupaten Layak Anak pada Forum Anak Desa	0	
34.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Ngengor Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
35.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Ngengor Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	0	
36.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Gandul Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	
37.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Gandul Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	0	
38.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Luworo Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 paket	
39.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Luworo Pilangkenceng	Pelatihan Kader Tribina	1 paket	
40.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Luworo Pilangkenceng	Pelatihan pada Kader dan kelompok UPPKS	0	
41.	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak	Ds. Luworo Pilangkenceng	Sosialisasi tentang Pojok Konsultasi tingkat Kecamatan dan Desa	0	
42.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Luworo Pilangkenceng	Pelatihan Pendidik/Konselor Sebaya pada pengurus dan Anggota PIK Remaja	0	
43.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Krebet Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	0	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Usulan	Besaran/ Volume	Catatan
44.	Program Pengendalian Penduduk Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Ds. Kreet Pilangkenceng	Pemutaran film tentang informasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBBPK)	0	
45.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kreet Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok tribina kecamatan	1 paket	
46.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kreet Pilangkenceng	Pelatihan Kader Tribina	1 paket	
47.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kreet Pilangkenceng	Sosialisasi program PIK Remaja	1 paket	
48.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Kreet Pilangkenceng	Pelatihan Pendidik/Konselor Sebaya pada pengurus dan Anggota PIK Remaja	1 paket	
49.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Kreet Pilangkenceng	Pembinaan pada kader dan kelompok UPPKS	1 paket	
50.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Kreet Pilangkenceng	Pelatihan pada Kader dan kelompok UPPKS	1 paket	
51.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Ngale Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 paket	
52.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Ngale Pilangkenceng	Pelatihan Kader Tribina	1 paket	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Usulan	Besaran/ Volume	Catatan
53.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Ngale Pilangkenceng	Sosialisasi program PIK Remaja	1 paket	
54.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Ds. Ngale Pilangkenceng	Pelatihan Pendidik/Konselor Sebaya pada pengurus dan Anggota PIK Remaja	1 paket	
55.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Pemberdayaan Keluarga	Ds. Ngale Pilangkenceng	Pelatihan pada Kader dan kelompok UPPKS	1 paket	
56.	Program Keluarga Berencana Pelayanan KB	Ds. Ngale Pilangkenceng	Pelayanan KB gratis pada momentum tertentu	1 paket	
57.	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Ds. Ngale Pilangkenceng	Sosialisasi tentang Kabupaten Layak Anak pada Forum Anak Desa	1 paket	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas PP&KB, PPPA Kabupaten Madiun yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Setiap daerah harus mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap OPD juga diwajibkan untuk membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

6.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun, Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun mengemban amanah untuk mensukseskan misi 4 yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan”, untuk itu dirumuskan tujuan dan sasaran PD yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak

Sasaran :

1. Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

6.3. Program Dan Kegiatan Dinas PP&KB, PP&PA Tahun 2020

Pada Tahun 2020, Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Dengan rencana realisasi :

- a. Sosialisasi kesehatan reproduksi pada masyarakat
- b. Promosi kesehatan reproduksi bagi masyarakat
- c. Pelatihan promotor kesehatan reproduksi berbasis desa

2. Kegiatan Pembinaan KB

Dengan rencana realisasi :

- a. Pelatihan Konselor KB Berbasis Desa (sasaran kader IMP & Dhasawisma)
- b. Pemantapan PUS oleh tim KB MKJP (sasaran unmetneed & peserta KB aktif non MKJP)
- c. Fasilitasi kelompok akseptor KB MKJP
- d. Sosialisasi KB pria bagi komunitas masyarakat
- e. Lomba konselor KB berbasis desa
- f. Bimtek kelompok akseptor KB MKJP

3. Kegiatan Pelayanan KB

Dengan rencana realisasi :

 - a. Pelayanan KB momentum (BST, HKG PKK KB Kesehatan, Manunggal TNI, HUT IBI, Harganas, HUT Polri, dll)
 - b. Pelayanan KB wilayah khusus (kampung KB, daerah terpencil/perbatasan, dll)
 - c. Fasilitasi bakti sosial Pelayanan KB MOW dan MOP
 - d. Pelayanan papsmear
 - e. Pemeriksaan analisa sperma pasca playanan MOP
4. Kegiatan Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR

Dengan rencana realisasi untuk pelatihan madis teknis CTU bagi bidan sebagai syarat bagi bidan untuk mempunyai standart dalam melaksanakan pelayanan KB dan fasilitasi untuk peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan pelayanan KB
5. Kegiatan Biaya Operasional KB/BOKB (DAK Non Fisik)

Yang digunakan sebagai biaya operasional pelaksanaan program KB baik di kantor maupun pada balai KB sebagai berikut :

 - a. Biaya operasional Balai Penyuluhan KB
 - b. Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
 - c. Biaya operasional penggerakan di Kampung KB
 - d. Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD DAN SUB PPKBD)
 - e. Dukungan media KIE dan manajemen BOKB
6. Kegiatan Pengadaan sarana prasarana program kependudukan dan KB (DAK Fisik)

Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan IUD Kit dan BKB Kit, sarana kerja sebagian Sub PPKBD, media/alat pengolah data/laptop dan sarana prasarana rumah data pada kampung KB percontohan.

II. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

7. Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan

Dengan rencana realisasi :

 - a. Bantuan operasional pada IMP (PPKBD & sub PPKBD)
 - b. Workshop peningkatan kapasitas IMP,
 - c. Lomba IMP dan peserta KB lestari
8. Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Dengan rencana realisasi :

 - a. Advokasi pada mitra kerja
 - b. Penggantian vinnyl,
 - c. Publikasi melalui media elektronik & non elektronik,
9. Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pelaksanaan pendataan keluarga dan penyusunan profil/parameter kependudukan

10. Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun

Kegiatan ini digunakan untuk gebyar kampung KB

III. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KETAHANAN KELUARGA DAN REMAJA

11. Pemberdayaan Keluarga

Rencana realisasi dari kegiatan ini adalah :

- a. Jambore Kader UPPKS
- b. Lomba kelompok UPPKS
- c. Pelatihan Kader UPPKS

12. Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja

Rencana realisasi kegiatan ini adalah :

- a. Pemilihan duta Genre
- b. Fasilitasi kelompok PIK Remaja
- c. Pelatihan Pendidik dan Konselor Sebaya bagi PIK Remaja
- d. Fasilitasi dan evaluasi kelompok PIK Remaja dan Tri bina
- e. Revitalisasi Ketahanan Keluarga, Kelembagaan, Kader dan Substansi

IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

13. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Rencana realisasi kegiatan ini adalah :

- a. Sosialisasi pemberdayaan perempuan dibidang Hukum
- b. Pendampingan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan
- c. Pengembangan KIE pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
- d. Peringatan hari kartini dan hari ibu

14. Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender

Rencana realisasi kegiatan ini adalah :

- a. Fasilitasi dan pemantapan pokja PUG
- b. Revitalisasi Focal Point bagi OPD se Kabupaten Madiun
- c. Pendampingan implementasi ARG untuk OPD

V. PROGRAM PENINGKATAN HAK, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

15. Penyediaan Data Gender dan Anak

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan profil gender

16. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

Rencana realisasi kegiatan ini adalah :

- a. Pendampingan korban kekerasan pada perempuan dan anak
- b. Penjangkauan perempuan dan anak korban kekerasan

- c. Bimtek, workshop, pelatihan penguatan dan pengembangan bagi SDM penyedia layanan perlindungan hak perempuan bagi PNS, non PNS, dan LSM
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pengaduan dan penelantaran, rujukan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum serta reintegrasi sosial dan pemulangan)
 - e. Operasional tim P2TP2A
17. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak
- Rencana realisasi kegiatan ini adalah :
- a. Fasilitasi gugus tugas KLA
 - b. Fasilitasi forum anak tingkat kabupaten dan kecamatan
 - c. Penguatan Puskesmas ramah anak
 - d. Restrukturisasi gugus tugas KLA
 - e. Penguatan sekolah ramah anak

Sedangkan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2020, namun hanya sebagai pendukung kegiatan teknis adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN

- 1. Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tahun 2020 Dinas PP&KB, PP&PA merubah baik indikator kinerja pada program dan kegiatan pendukung/kesekretariatan yang lebih tepat dan terukur agar dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah periode 2018-2023 sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Perubahan Indikator Sasaran Pendukung Dinas PP&KB, PP&PA Kabupaten Madiun Tahun 2020-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2020	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Program	
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,22	Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	1. Rata-rata Jumlah Anak Yang Dilahirkan Wanita Selama Masa Reproduksi (Total Fertility Rate / TFR)	2,19	Program Peningkatan Kapasitas Kependudukan	
							Program Keluarga Berencana	
						2. Persentase keluarga sejahtera	83,35	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,57	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	3. Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintah dan politik	7,12	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
				Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	4. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100,00	Program Peningkatan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	5. Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	75,00	Program Pelayanan Kesekretariatan	
					6. Nilai SAKIP OPD	A		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis DPP&KB, PP&PA Tahun 2018-2023 berdasarkan RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk segera mulai mengejar target kinerja yang akan dicapai.

Indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Indikator Kinerja dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Ada 4 Indikator Kinerja Utama kedua urusan tersebut adalah :

1. Rata - rata anak yang dilahirkan wanita selama masa reproduksinya (total Fertility Rate/TFR)
2. Persentase keluarga sejahtera
3. Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan politik
4. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti

Adapun Indikator Kinerja Program/Outcome dan Indikator Kinerja Kegiatan/Outputnya adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
I.	Program Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif
1.	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah promosi hak reproduksi individu yang dilakukan
2.	Pembinaan KB	Jumlah Kelompok KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/ MKJP
3.	Pelayanan KB	Jumlah peserta KB Baru
		Jumlah akseptor KB yang dilayani
4.	Biaya Operasional KB/BOKB (DAK Non Fisik)	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
5.	Pengadaan sarana prasarana program kependudukan dan KB (DAK Fisik)	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program kependudukan dan KB
6.	Penunjang DAK	Operasional Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program kependudukan dan KB
7.	Standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR	Jumlah tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi/mendapat sertifikat CTU
II.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need
8.	Pemberdayaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah kader IMP yang mandiri
9.	Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah publikasi program melalui media elektronik dan non elektronik
10.	Peningkatan Kapasitas Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan
11.	Fasilitasi Pembentukan Kampung KB di Kabupaten Madiun	Jumlah kampung KB yang mandiri
III.	Program Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 tahun
12.	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif
13.	Penguatan Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Kader Tri Bina dan kelompok PIK Remaja yang aktif
IV.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi
14.	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah perempuan yang bekerja
15.	Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	Jumlah lembaga berbasis gender yang aktif
V.	Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak
16.	Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen data gender dan anak
17.	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
18.	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Forum Anak dan lembaga layanan anak yang terfasilitasi
VI.	Program Pelayanan Kesekretariatan	- Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah - Nilai SAKIP OPD
19.	Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian dan Sarana Prasarana	* Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan * Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi * Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan
20.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Semua target kinerja dapat tercapai dengan adanya tingkat partisipasi masyarakat yang ditandai dengan adanya keikutsertaan secara aktif dalam mendukung dan ikut melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) oleh Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yaitu Pembantu Petugas KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, kelompok Tri Bina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Bina Keluarga Lansia/BKL), kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja 2020 ini.